**ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk melakukan studi kritis terhadap pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagai upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjelang Pilkada 2020. SKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Pasal 104 huruf (f) menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten dan Kota memiliki kewajiban dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif. Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini dibagi ke dalam tiga dimensi yang merupakan bagian dari tujuan sosialisasi politik, yaitu (1) dimensi psikologis, yakni sosialisasi politik ditujukan untuk membentuk sikap dan kepribadian politik dengan cara bertahap, (2) dimensi ideologis yakni proses menerima ideologi yang telah menjadi keyakinan, dan (3) dimensi normatif, adalah kondisi terintegrasinya sikap dan moral.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Informan didapatkan dengan cara *Purposive Sampling dan Snowball Sampling* sesuai dengan kriteria fokus penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman. Uji validitas data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni peneliti akan membandingkan hasil wawancara langsung dengan hasil studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yakni SKPP di Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan dua kali tahun 2019 dan 2020. Para peserta SKPP ini telah dibekali ilmu, pengetahuan terkait kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif menjelang Pilkada 2020. Dari studi kritis terhadap ketiga dimensi pada tujuan sosialisasi politik yakni dimensi psikologis, ideologis, dan normatif, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah mampu berupaya memenuhi dan mengembangkan ketiga dimensi tersebut dengan cukup baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga Rencana Tindak Lanjut (RTL). Pada dasarnya ketiga dimensi tersebut memiliki kekurangan dan juga keunikannya masing-masing. Faktor penghambat terbesar adalah adanya pandemi covid-19. Disisi lain terdapat keunikan yakni, kader SKPP bisa menerapkan pengetahuan dan pengalamannya kepada masyarakat, meskipun RTL tidak terlaksana, sehingga dampak positif dari sosialisasi politik ini bisa dirasakan dengan baik oleh kader SKPP.

*Kata Kunci****:*** *Pendidikan Politik, Bawaslu, dan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.*